



Midji Kukuh Tetap Posting di Medsos

Usung Transparansi, Fanspage Jadi Media Komunikasi

Kamis (20/9). Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar, M Jimi.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji memastikan tetap akan mem-posting tentang pelaksanaan pemerintahan dan kebijakannya di media sosial. Langkah ini sebagai bagian dari keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan.



Sutarmidji

"Sepanjang yang disampaikan adalah hal-hal untuk perbaikan maka tidak ada masalah," katanya,

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, M Jimi mempersoalkan gaya pimpinan Sutarmidji yang sering memposting kebijakannya di media sosial, khususnya di akun Facebook @BangMidji. Salah satu yang dipermasalahkan adalah posting tentang rencana Sutarmidji memangkas anggaran perjalanan dinas.

Menurut Jimi, hal itu dapat

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Midji Kukuh Tetap Posting di Medsos

Sambungan dari halaman 1

memunculkan opini liar di masyarakat. Ia menyarankan Sutarmidji berunding terlebih dahulu dengan DPRD sebelum melempar opini ke media sosial. "Ajak dong kita bicara. Duduk satu meja. Mana (anggaran) yang mau dicoret atau digeser. Masak lempar opini ke media sosial," ucapnya.

Sementara menurut Sutarmidji, alasannya mengekspose rencana pemangkasan anggaran perjalanan dinas beberapa waktu lalu karena mengacu pada hasil pertemuan di lingkungan Pemprov (rapat koordinasi). Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berkeinginan semua kebijakan serba transparan.

"Dan saya sudah buat ar-

han itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah dan itu tetap akan saya lakukan terus," tegasnya. Ke depan, media sosial fanspage miliknya tetap akan dijadikan sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Semua akan disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Ia pun memastikan akan banyak lagi informasi yang disampaikan lewat media sosial tersebut. "Saya akan terus menginformasikan segala sesuatu kepada masyarakat melalui fanspage. Saya sudah lakukan sejak jadi wali kota, jadi tidak ada masalah bagi saya," katanya.

Bahkan Midji juga berencana membuat suatu sistem sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI da-

pat mengetahui kondisi kas daerah secara real time. BPK bisa langsung mengakses sistem ini sehingga tidak lagi kesulitan saat melakukan audit keuangan.

"Berapa transaksinya di kas diketahui (BPK). Nah, saya tetap akan mem-posting apapun yang perlu diketahui masyarakat. Itu bentuk atau cara dari sosialisasi dan tidak akan ada yang disembunyi-sembunyikan," ujarnya.

Menurutnya, kebiasaan lama yang takut mengungkapkan segala hal yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik harus ditinggalkan. Midji menilai akan lebih baik salah dalam mengungkapkan dari pada tidak pernah memberikan informasi sama sekali. "Pemprov Kalbar harus terbiasa seperti itu," ucapnya.

Semua ini dilakukan demi mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Keterbukaan khususnya dalam penggunaan anggaran adalah peningkatan indeks persepsi korupsi.

Midji mencontohkan seperti di Kota Pontianak ketika ia menjabat wali kota, transparansi mampu mengantarkan ibu kota Kalbar itu menduduki peringkat kedua terbaik indeks persepsi korupsi se-Indonesia. Pontianak meraih skor 66,5, di bawah Jakarta Utara dengan skor 73,9.

"Provinsi kalau tidak salah lumayan bagus, lima puluh lebih. Tapi tetap harus ada peningkatan indeks yang cepat, jangan lambat," pungkasnya. (**bar**)